

**PENDIDIKAN PEREMPUAN : SEBAB ATAU DAMPAK PERKAWINAN ANAK DI KALIMANTAN SELATAN?  
(Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012)**

Norma Yuni Kartika<sup>1</sup>, Muhajir Darwin<sup>2</sup>, Sukamdi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Kandidat Doktor Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

<sup>2</sup>Promotor, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

<sup>3</sup>Ko-Promotor, Dosen Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

[norma.yuni.k@mail.ugm.ac.id](mailto:norma.yuni.k@mail.ugm.ac.id)

**ABSTRAK**

Pepatah mengatakan “ketika anda mendidik seorang wanita, sama dengan anda mendidik bangsa”. Pencapaian pendidikan, bahkan pada tingkat dasar, memiliki implikasi positif yang besar dalam pembangunan manusia. Seperti diketahui bersama bahwasannya pendidikan memiliki peran yang penting dalam struktur pembangunan manusia Indonesia, juga pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai satu dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Sedangkan variabel penting dalam mengendalikan kuantitas penduduk adalah mendewasakan usia menikah pertama perempuan Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui data awal apakah pendidikan perempuan sebagai sebab atau dampak dari perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Selatan.

Data sekunder yang digunakan dalam tulisan ini adalah data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012. Variabel dalam tulisan ini ada dua, yaitu pencapaian pendidikan perempuan dan perkawinan anak. Pencapaian pendidikan perempuan terdiri dari tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tidak tamat SMP, tamat SMP, dan tamat SMA/PT. Perkawinan anak perempuan adalah perempuan usia 15-49 tahun yang usia perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun. Populasi tulisan ini adalah semua perempuan 15-49 tahun baik yang menikah sah sesuai undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perempuan yang hidup bersama. Data SDKI tahun 2012 dianalisis dengan distribusi prosentase.

Diperoleh hasil yaitu (1) persentase tertinggi perempuan menikah di bawah 18 tahun tidak tamat SD; (2) persentase tertinggi perempuan menikah di atas 18 tahun adalah tamat SMP; (3) perempuan menikah di bawah 18 tahun yang tidak sekolah 3 kali perempuan yang menikah di atas 18 tahun; (4) ketimpangan persentase yang besar antara perempuan yang menikah di bawah 18 dan di atas 18 tahun adalah tamat SMP dan tamat SMA/PT.

**Kata kunci:** pendidikan, perempuan, sebab, dampak, perkawinan anak

## I. PENDAHULUAN

Pepatah mengatakan “ketika anda mendidik seorang wanita, sama dengan anda mendidik bangsa”. Pencapaian pendidikan, bahkan pada tingkat dasar, memiliki implikasi positif yang besar dalam pembangunan manusia. Seperti diketahui bersama bahwasannya pendidikan memiliki peran yang penting dalam struktur pembangunan manusia Indonesia, juga pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai satu dari 33 provinsi yang ada di Indonesia.

Pentingnya pendidikan bagi perempuan Indonesia di dobrak oleh Kartini seabad lalu. Pentingnya pendidikan bagi perempuan bukan sekedar *tittle*, pendidikan merupakan modal awal perempuan untuk memberdayakan potensi diri dan berkontribusi pada pembangunan manusia suatu bangsa. Perempuan yang berpendidikan cenderung berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan manusia.

Kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk merupakan dasar permasalahan kependudukan. Variabel penting dalam mengendalikan kuantitas penduduk adalah mendewasakan usia menikah pertama perempuan. Sedangkan variabel penting kualitas penduduk diantaranya adalah pendidikan. Pendidikan perempuan penting, karena pendidikan tidak hanya merupakan pendorong ekonomi, pendidikan perempuan dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi, dengan pendidikan dan pengetahuan yang memadai perempuan mampu mendidik dan memberikan gizi serta merawat generasi yang dilahirkan dengan baik. Sehingga imbas dari pendidikan yang dimiliki perempuan akan mendewasakan usia menikah pertamanya.

Perkawinan anak atau pernikahan dini menjadi isu yang kembali mencuat di jaman emansipasi ini. Di Indonesia berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010-2013 persentase wanita berumur 10 tahun keatas yang saat perkawinan pertama berumur kurang dari 16 tahun di Kalimantan Selatan tertinggi se-Indonesia, yaitu 17,79, 16,78, 16,06 dan 15,48 persen, sedangkan persentase Indonesia yaitu 12,26, 11,52, 11,13 dan 11 persen. Apabila dibandingkan, persentase di Provinsi Kalimantan Selatan selama 4 tahun berada jauh di atas persentase Indonesia.

Perempuan dengan pendidikan yang rendah cenderung menikah muda, dan beberapa kasus pernikahan di usia anak menyebabkan perempuan putus sekolah atau dikeluarkan dari sekolah. Lung Vu (2009) menemukan bahwa pendidikan secara signifikan berhubungan dengan usia pernikahan pertama di Vietnam, sementara Agaba *et al* (2011) menunjukkan bahwa pencapaian pendidikan, merupakan penentu sosial-ekonomi yang kuat dari pernikahan pertama di Uganda Barat. Kedua studi ini menggarisbawahi pengaruh pencapaian pendidikan anak perempuan dalam menentukan usia pernikahan pertama.

## II. KAJIAN TEORI

**Pendidikan sebagai sebab atau dampak perkawinan anak?** Banyak temuan menyatakan pendidikan yang rendah menyebabkan perkawinan anak, disisi lain perkawinan anak juga bisa berdampak pada rendahnya pendidikan seorang perempuan. Menggunakan data sekunder, penulis ingin mengetahui capaian pendidikan perempuan di Kalimantan Selatan, yang nantinya akan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan data primer.

Beberapa temuan yang menguatkan teori pendidikan rendah sebagai penyebab perkawinan anak antara lain : Menurut Grossbard-Shechtman perempuan yang memiliki pendidikan tinggi memperlihatkan kurangnya minat untuk menikah. Keeley menyatakan perempuan yang masih berada dalam sebuah institusi pendidikan cenderung untuk menikah seusia sekolah, sehingga institusi membuat perempuan menikah di usia lanjut. Pendapat Klaauw, berdasarkan teori, ketertarikan untuk menikah dan membuat keluarga baru pada perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk belajar dan bekerja lebih rendah. Karena perempuan yang memiliki pekerjaan yang baik, lebih memilih pekerjaan dibandingkan pernikahan (dalam Bruederl dan Diekmann, 1997). Djamilah (2014) umumnya penyebab perkawinan anak karena perjodohan ataupun putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk pendidikan. Maryanti dan Septikasari (2009) penyebab pernikahan dini salah satunya karena pendidikan rendah.

Dampak perkawinan anak di beberapa negara menunjukkan hal yang kurang menggembirakan terkait pendidikan, temuan ini menguatkan teori pendidikan rendah

merupakan dampak dari perkawinan anak. Studi Field dkk (2004) di Bangladesh mengungkapkan beberapa akibat pernikahan anak : *drop out* sekolah yang tinggi, risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya kontrol terhadap kesehatan reproduksi, dan peluang terjadinya kematian ibu tinggi. Sementara penelitian di Ethiopia (2006) memperlihatkan dampak negatif dari pernikahan anak, antara lain : ketidaksetaraan status perempuan dan kesejahteraan anak membawa dampak sosial, ekonomi dan kesehatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

### **III. METODE**

Analisis data sekunder menjadi jenis penelitian pada tulisan ini. Analisis data sekunder menurut David E. Gray (2009) adalah rangkaian kerja analisis yang dilakukan untuk interpretasi dan penarikan kesimpulan atau untuk mendapatkan pengetahuan tambahan yang berbeda dengan pengumpulan dan analisis data sebelumnya. Data sekunder bisa berasal dari berbagai metode pengumpulan data seperti sensus, survey maupun dokumen, yang belum semuanya digunakan dalam analisis sebelumnya.

Data sekunder yang digunakan dalam tulisan ini adalah data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012. Alasan menggunakan data SDKI tahun 2012 sebagai *background* awal untuk penelitian selanjutnya. Variabel dalam tulisan ini ada dua, yaitu pencapaian pendidikan perempuan dan perkawinan anak. Pencapaian pendidikan perempuan terdiri dari tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tidak tamat SMP, tamat SMP, dan tamat SMA/PT. Perkawinan anak perempuan adalah perempuan usia 15-49 tahun yang usia perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun. Populasi tulisan ini adalah semua perempuan 15-49 tahun baik yang menikah sah sesuai undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perempuan yang hidup bersama. Data SDKI tahun 2012 dianalisis dengan distribusi prosentase.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

UNICEF (2001) dalam “*Early Marriage : Child Spouses*” menjadikan pernikahan anak di bawah usia 18 sebagai fokus kajian. Dalam tulisan ini, batasan usia perkawinan perempuan yang digunakan mengacu pada batasan UNICEF, yaitu usia kawin pertama

perempuan di bawah 18 tahun dan di atas 18 tahun. Keinginan Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan ditegaskan dalam pasal 31 ayat (1) yang terdapat dalam batang tubuh undang-undang Dasar 1945, bahwa “setiap warganegara berhak mendapat pendidikan”. Memperoleh pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Distribusi prosentase usia menikah berdasarkan pencapaian pendidikan perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Distribusi Prosentase usia menikah berdasarkan pencapaian pendidikan perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan**

Pencapaian Pendidikan Perempuan	Usia Menikah Pertama	
	< 18 tahun	>18 tahun
Tidak sekolah	5,92	1,85
Tidak tamat SD	30,81	13,32
Tamat SD	27,01	17,03
Tidak Tamat SMP	30,10	24,28
Tamat SMP	5,69	28,33
Tamat SMA/PT	0,47	15,18
	100	100

*Sumber : Hasil pengolahan data SDKI Tahun 2012*

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, berdasarkan pencapaian pendidikan perempuan **persentase tertinggi pada usia menikah di bawah 18 tahun 30,81 persen tidak tamat SD**. Ini membenarkan studi Grogger & Stephen (1993) bahwa pendidikan yang rendah akan berakibat terputusnya informasi yang diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi selain juga meningkatkan kemungkinan aktivitas remaja yang kurang. Tingkat pendidikan berkaitan dengan usia kawin pertama. Semakin dini seseorang melakukan perkawinan semakin rendah tingkat pendidikannya.

*Kedua*, **persentase tertinggi pendidikan perempuan menikah di atas 18 tahun adalah tamat SMP 28,33 persen**. Artinya perempuan yang menikah di atas 18 tahun mayoritas menyelesaikan program pemerintah wajib pendidikan dasar sembilan tahun. Sejalan dengan kajian di India bahwa perempuan yang mengenyam pendidikan sembilan tahun menikah di atas 18 tahun (Santhya et al., 2010).

*Ketiga*, **perempuan menikah di bawah 18 tahun yang tidak sekolah 3 kali perempuan yang menikah di atas 18 tahun**. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik (Suprpto dkk, 2004). Perempuan tanpa pendidikan adalah perempuan yang kehilangan haknya untuk memberdayakan potensi diri, kehilangan hak diri, karena perempuan menikah disibukkan dengan hal-hal domestik rumah tangga.

*Keempat*, apabila persentase perempuan menikah di atas 18 yang **tidak sekolah, tidak tamat SD dan tamat SD** di jumlah maka diperoleh sebanyak 32,20 persen, sedangkan yang menikah di atas 18 tahun dua kali lipatnya, yaitu 63,74 persen, ini hampir sama dengan hasil riset UNICEF (2005) di Filipina 70 persen perempuan yang berpendidikan rendah dan tidak sekolah, menikah pada usia kurang dari 18 tahun.

*Kelima*, terkait belum maksimalnya program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah untuk diakses semua warga negara tanpa terkecuali dan temuan UNICEF (2005) di seluruh negara berkembang di dunia, seperti di negara Tanzania bahwa 92 persen perempuan yang tidak mengambil pendidikan SMP, menikah di bawah usia 18 tahun, persentase yang nyaris sama juga ditemukan di Kalimantan Selatan pada hasil kajian ini. **Perempuan menikah di bawah 18 tahun yang tidak memiliki ijazah formal jenjang pendidikan SMP sebanyak 93,84 persen**.

*Keenam*, persentase pencapaian pendidikan yang sama-sama tinggi dan tidak terlalu jauh intervalnya adalah **tidak tamat SMP**, 30,10 persen perempuan menikah di bawah 18 dan 24,28 persen perempuan menikah di atas 18 tahun. Ini bisa dijadikan riset lanjutan, apa alasan yang membuat perempuan menikah persentase tidak tamat SMP sama-sama tinggi. Alemu (2007) dalam penelitiannya di Ethiopia menyatakan bahwa pernikahan dini memiliki konsekuensi pemutusan pendidikan. Sebanyak 28 persen perempuan menikah dan 19 persen memiliki anak, semua ini menjadi alasan untuk berhenti sekolah, 4 persen ditolak pihak sekolahan karena sudah menikah. Apakah hasil penelitian Alemu juga ditemukan di Kalimantan Selatan? Akan menjadi tema yang unik untuk dikaji selanjutnya.

*Ketujuh*, terdapat **ketimpangan yang besar antara perempuan yang menikah di bawah 18 dan di atas 18 tahun pada tamat SMP** yaitu 5,69 persen dengan 28,33 persen. Bayisenge (2007) menyatakan bahwa perempuan yang menikah kurang dari 18 tahun memiliki pendidikan yang rendah dan tidak berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Ini juga berhubungan dengan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 melalui ijin orang tua perempuan usia 16 tahun dibolehkan menikah. Usia 16 tahun apabila dilihat dari usia ideal sekolah masih duduk di bangku SMA, atau setahun setelah anak perempuan lulus di SMP. Sesuai dengan program wajib belajar Sembilan tahun yang berlaku di Indonesia, perempuan yang menikah di atas 18 tahun prosentasenya tertinggi di tamatan SMP.

*Kedelapan*, perempuan yang menikah di bawah 18 tahun hanya 0,47 persen yang **menamatkan SMA/PT** dan 15,18 persen perempuan menikah di atas 18 menamatkan SMA/PT. Keunggulan sekolah setingkat SMA adalah adanya program Pusat Informasi dan Konseling Remaja ( PIK-Remaja) yang hanya disampaikan pada jenjang pendidikan ini. Singh dan Samara (1996) dalam penelitiannya menemukan bahwa seorang wanita yang telah mengikuti sekolah menengah jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menikah dini.

Untuk perempuan yang tidak sekolah, putus sekolah, tidak tamat SD, tidak tamat SMP, dan tidak tamat SMA, pemerintah mengupayakan mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan sepertisaanggar pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), paket A, paket B dan paket C, ada juga sekolah menengah pertama terbuka atau biasa disebut SMP Terbuka. Sedangkan untuk pendidikan tinggi (PT) ada system pendidikan jarak jauh (*distance learning*), salah satunya Universitas Terbuka. Ini menjadi alternative bagi perempuan untuk tetap mengejar mimpi dan haknya di bidang pendidikan.

Pendidikan yang rendah bisa mendorong perempuan untuk melakukan perkawinan anak, apabila perempuan sudah tidak sekolah lagi dan tidak bekerja, kecenderungan untuk menikah jauh lebih tinggi. Ini merupakan pendidikan sebagai penyebab perkawinan anak. Belum diketahui secara empiris alasan mengapa perempuan putus sekolah, persentase tidak tamat SD, tidak tamat SMP yang tinggi, apakah

disebabkan karena perempuan yang menikah saat masih di bangku sekolah hingga memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya atau kebijakan dari sekolah yang tidak mengizinkan siswinya yang menikah untuk tetap mengikuti proses belajar mengajar. Kelemahan data sekunder adalah variable yang bisa dianalisis hanya yang tersedia saja, sehingga perlu kajian lebih dalam melalui data primer untuk mengetahui sebesar apa pendidikan menyumbang perkawinan anak dan sebesar apa pula dampak perkawinan anak pada pendidikan perempuan.

## **V. KESIMPULAN**

Apapun kendalanya setiap perempuan harus memiliki kesempatan untuk tetap mendapatkan pendidikan, baik untuk perempuan yang sama sekali belum pernah mendapatkan pendidikan atau untuk perempuan putus sekolah yang ingin menyelesaikan pendidikannya, bahkan untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Karena program PIK-Remaja hanya disampaikan di bangku SMA, pemerintah bersama instansi terkait seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial dan BKKBN mensosialisasikan PIK-Remaja dari pendidikan dasar, bisa juga melalui Karang Taruna, PKK Remaja dan organisasi-organisasi remaja lainnya agar menekan dan meniadakan perkawinan anak di Kalimantan Selatan.

## **VI. PENGHARGAAN**

Tulisan ini adalah sebagian kecil dari Disertasi yang sedang dikerjakan oleh Norma Yuni Kartika. Ucapan terima kasih dan salam hormat kami sampaikan kepada para pembimbing disertasi yaitu Prof. Dr. Muhajir Darwin selaku promotor, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan Dr. Sukamdi, M.Sc selaku ko-promotor, dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Semoga selalu terjalin silaturahmi diantara kami.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alemu, Bogalech. 2007. *Early Marriage in Ethiopia : Causes and Health Consequances*. International Center for Research on Woman.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Selatan Tahun 2010*. Banjarmasin : BPS

- \_\_\_\_\_. 2011. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Selatan Tahun 2011*. Banjarmasin : BPS
- \_\_\_\_\_. 2012. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Selatan Tahun 2012*. Banjarmasin : BPS
- \_\_\_\_\_. 2013. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Selatan Tahun 2013*. Banjarmasin : BPS
- Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kementerian Kesehatan. 2013. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*. Indonesia : BPS
- Bayisenge, Jeannette. 2011. *Early Marriage As A Barrier To Girl's Education : A Developmental Challenge in Africa*.
- Bruederl, Josef and Andreas Diekmann. 1997. *Education and Marriage, a comparative study. ISA World Congress, Bielefeld*. H. 7
- Djamilah, Reni Kartikawati. 2014. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*. Volume 3, No 1, Mei 2014
- Field, E dkk. 2004. *Consequences of Early Marriage for Women in Bangladesh*.
- Gray, David E. 2009. *Doing Research in the Real World*. New Delhi: Sage Publications Ltd.
- Grogger, J and Stephen B. 1993. *The Socioeconomics Consequences of Teenage Childbearing: Findings from a Natural Experiment*. Family Planning Perspective. 1993; 25(4): 156-161 & 174
- Maryanti, D dan Septikasari, M. 2009. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum*. Yogyakarta : Nuha Medika
- Singh, Susheela dan Renee Samara. 1996. Early Marriage Among Woman In Developing Countries. *International Family Planning Perspectives*, 22: 148-157 dan 175.
- Santhya, K.G, Usha Ram, Rajib Acharya, Shireen J. Jejeebhoy, Faujdar Ram dan Abhishek Singh. 2010. Associations Between Early Marriage and Young Women's Marital and Reproductive Health Outcomes : Evidence from India. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*. Volume 36 Nomor 3 : 132-139
- Suprapro A, Pradono J, dan Hapsari D. 2004. *Determinan Sosial Ekonomi Pada Pertolongan Persalinan di Indonesia*. Majalah Kedokteran Perkotaan. Volume 2, No. 2, hal. 18-29
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara
- UNICEF. 2001. *Early Marriage : Child Spouses*. Innocenty Digest (7). The United Nations Children's Fund (UNICEF).
- \_\_\_\_\_. 2005. *Early Marriage : a Harmful Traditional Practice*. The United Nations Children's Fund (UNICEF).
- Vu, Lung. 2005. *Age at First Marriage in Vietnam : Trends and Determinants*. Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine.